

**ABSTRAK PENELITIAN BERBASIS  
HIBAH UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
(U.P.T)  
TAHUN 2014**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Universitas Hasanuddin  
Kampus Unhas Tamalanrea  
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar  
Telp. : 0411 587032, , 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024  
Website : <http://www.unhas.ac.id/lppm> email : [lp2m@unhas.ac.id](mailto:lp2m@unhas.ac.id)

## **BIDANG ILMU EKOSOSBUDKUM BIDANG KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

### **KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KENDALA PENANGGULANGANNYA**

Aminuddin Ilmar, Pangerang Muenta, Naswar, Achmad

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berupaya mengungkapkan relasi keadaan darurat bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 dengan keadaan bahaya atau keadaan darurat yang dimaksud dalam UU No. 23 Prp Tahun 1997 sebagai penjabaran ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Pengungkapan relasi kedua keadaan yang pengertiannya merujuk kepada persoalan yang sama itu akan menjadi dasar bagi upaya pengidentifikasi corak dan jenis tindakan-tindakan luar biasa yang dapat ditrapkan dalam menanggulangi dampak bencana pada saat tanggap darurat. Selain itu, juga mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi terkait upaya penanggulangan dampak bencana pada saat tanggap darurat. Untuk mengungkapkan hal tersebut, ada beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisisnya, yaitu teori konstitusi dan teori tata negara darurat. Paparan kosep-konsep teori ini berpijak pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder. Selanjutnya, untuk mendukung pengungkapan permasalahan penelitian juga digunakan data primer yang diperoleh dari responden yang dipilih, yaitu para pejabat pada BPBD Sidrap. Dari penelitian yang dilakukan sejauh ini, terungkap bahwa keadaan yang disebut sebagai 'darurat bencana' sesungguhnya adalah 'keadaan bahaya' itu sendiri. Keduanya mempersyaratkan adanya (i) ancaman yang membahayakan; (ii) kebutuhan yang mengharuskan; (iii) kegentingan waktu; dan (iv) tidak tersedia alternatif lain yang lebih baik dan lebih efektif untuk mengatasi keadaan. Keduanya juga memprsyaratkan dilakukannya deklarasi atau pernyataan resmi dalam rangka pemberlakuan keadaan darurat atau keadaan yang bersifat tidak normal itu. Oleh karena itu, dalam hal keadaan darurat bencana ditetapkan menurut UU No. 24 Tahun 2007, sementara keadaan bahaya tidak dideklarasikan resmi berdasarkan UU No. 23 Prp Tahun 1959, keadaan darurat bencana yang dimaksud disebut sebagai 'keadaan bahaya de facto' saja, 'emergency de facto', bukan 'emergency de jure'. Implikasinya adalah, BNPB dan BPBD tidak boleh memfungsikan fasilitas hukum darurat yang disediakan oleh UU No. 23 Prp Tahun 1997.

# **DISASTER EMERGENCY CONDITION AND THE SOLUTION OBSTACLE**

Aminuddin Ilmar, Pangerang Muenta, Naswar, Achmad

## **ABSTRACT**

This research seek express disaster emergency condition relation according to UU No. 24 Year 2007 with a tight hole or emergency situation purposed in UU No. 23 Prp Tahun 1997 as Pasal provision spelling out 12 UUD NRI Tahun 1945. Kedu relation disclosure condition that the understanding referred to the problem that is same will be basic for shade identifier effort and extraordinary type actions that can ditrapkan in overcoming disaster impact in emergency perceptive moment. Apart from also couched constraints that faced related by disaster impact solution effort in emergency perceptive moment. To express thing, there is a few theories used as the analysis knife, namely constitution theory and emergency national order theory. Kosep-konsep description this theory stand on in primary law material, secondary law material, and tertiary law material that is secondary data. Next, to support research problem disclosure also used primary data that obtained from respondent selected, namely officialdom in BPBD Sidrap. From research conducted so far, reveal that condition called as 'disaster emergency' actually is 'a tight hole' itself. Both mempersyaratkan threat existence (i) that endanger; (ii) need that require; (iii) time crunch; and (iv) not available other alternative that better and more effective to overcome condition. Both also memprsyaratkan conducted by him declaration or official statement in emergency condition implementation framework or condition that not normal. Therefore, in disaster emergency condition thing determined according to UU No. 24 Year 2007, while a tight hole not declared official based on by UU No. 23 Prp Tahun 1959, disaster emergency condition purposed called as 'facto de danger condition' only , 'emergency facto de', not 'emergency jure de'.. The implication is, BNPB and BPBD cannot function emergency law facility provided by UU No. 23 Prp Tahun 1997.